Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

Tax On Digital Business: A Systematic Literature Review

Penulis:
Erine Tri Florencia[1]
Dana Farhana [2]
Mukhtaruddin[3]

Afiliasi:
Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Indonesia[1,2,3]

Korespondensi:
erineflorencia1991@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 03-03-2026
Accepted: 04-03-2026
Published: 12-03-2026

Abstrak:
Perkembangan bisnis digital yang pesat telah mengubah struktur perekonomian global serta memunculkan tantangan dan peluang baru dalam optimalisasi penerimaan pajak. Transformasi transaksi menuju platform digital, aktivitas lintas batas negara, serta model bisnis berbasis teknologi menuntut adanya penyesuaian kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami sejauh mana bisnis digital berkontribusi terhadap penerimaan pajak serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2016–2026 dianalisis secara sistematis. Kajian ini mensintesis temuan empiris terkait pertumbuhan transaksi digital, aktivitas bisnis digital lintas negara, kebijakan perpajakan digital, serta kapasitas institusional administrasi pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekspansi bisnis digital berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan volume transaksi, dokumentasi digital yang lebih tertelusur, serta formalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, literatur juga menyoroti berbagai tantangan struktural, seperti kompleksitas yurisdiksi, kesenjangan regulasi, risiko pengalihan laba (*profit shifting*), serta keterbatasan kapasitas administrasi pajak yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Dampak bisnis digital terhadap penerimaan pajak bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, infrastruktur digital, serta kekuatan kelembagaan suatu negara. Bisnis digital memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan kapasitas institusi perpajakan. Penelitian ini berkontribusi dengan memetakan perspektif teoretis dominan serta mengidentifikasi implikasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal di era ekonomi digital.

Kata kunci: Bisnis Digital, Ekonomi Digital, Penerimaan Pajak, Pajak Digital, Kebijakan Fiskal

Pendahuluan

Digital business telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi, peningkatan penetrasi internet, serta perubahan preferensi konsumen menuju transaksi berbasis digital (Wang et al., 2025; Biancolin & Rotaris, 2024; Paun et al., 2024) Transformasi ini tidak hanya menggeser pola perdagangan dari sistem konvensional ke platform daring, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi secara global. Model bisnis berbasis *marketplace, platform digital*, dan *cross-border transactions* memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis yang jelas. Perkembangan tersebut menjadikan *digital business* sebagai salah satu

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di berbagai negara, baik maju maupun berkembang (Liu et al., 2026; Yang et al., 2023; Liang et al., 2021).

Pesatnya perkembangan *digital business* membawa implikasi signifikan terhadap sistem perpajakan nasional. Karakteristik utama transaksi digital yang tidak selalu membutuhkan kehadiran fisik (*physical presence*) menimbulkan tantangan dalam menentukan yurisdiksi pemajakan dan hak pemungutan pajak (Cahyadini et al., 2024; Sun et al., 2024; Mpofu & Mhlanga, 2022). Selain itu, penggunaan server luar negeri, mekanisme pembayaran elektronik, serta perantara platform global menciptakan kompleksitas dalam pelaporan dan pengawasan pajak. Kondisi ini memunculkan potensi kesenjangan antara pertumbuhan aktivitas ekonomi digital dan optimalisasi penerimaan pajak negara. Dengan demikian, perkembangan *digital business* tidak hanya berdampak pada struktur perdagangan, tetapi juga pada efektivitas sistem fiskal (Bellon et al., 2022; Mpofu, 2022; Tofan & Bostan, 2022).

Di satu sisi, ekspansi *digital business* berpotensi meningkatkan *tax revenue generation* melalui perluasan basis pajak, peningkatan volume transaksi, dan formalitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung dalam platform digital (Liu & Lian, 2025; Saptono et al., 2024; Mpofu, 2022) . Digitalisasi transaksi memungkinkan pencatatan yang lebih transparan dan terdokumentasi, sehingga secara teoritis dapat memperkuat pengawasan pajak. Di sisi lain, celah regulasi, perbedaan tarif antar negara, serta praktik penghindaran pajak dalam ekonomi digital berpotensi mengurangi efektivitas pemungutan pajak. Ketidakseimbangan antara inovasi bisnis dan adaptasi regulasi fiskal seringkali menyebabkan erosi basis pajak, khususnya dalam transaksi lintas batas (Cahyadini et al., 2025; Parastatidou, 2025; Mpofu & Moloi, 2022).

Merespons tantangan tersebut, berbagai negara mulai mengembangkan kebijakan perpajakan digital, termasuk penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi elektronik, pajak layanan digital, serta reformasi aturan permanent establishment dalam konteks ekonomi digital (Omodero, 2025; Aulia & Hambali, 2022; Setyowati et al., 2020). Upaya harmonisasi kebijakan melalui kerja sama internasional juga menjadi agenda penting untuk mengatasi pergeseran laba dan potensi double taxation. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur administrasi perpajakan, tingkat literasi pajak pelaku usaha digital, serta dinamika politik dan ekonomi global. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pajak digital sangat bergantung pada kapasitas institusional dan koordinasi antarnegara (Anomah et al., 2024; Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022).

Literatur akademik mengenai hubungan antara *digital business* dan *tax revenue generation* menunjukkan temuan yang beragam dan belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menekankan bahwa pertumbuhan transaksi digital berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama ketika didukung oleh regulasi yang adaptif dan sistem administrasi yang kuat (Anomah et al., 2024; Vărzaru et al., 2023; Mu et al., 2022). vPerbedaan pendekatan metodologis, indikator pengukuran, serta variasi konteks negara dan periode penelitian menyebabkan fragmentasi hasil empiris yang cukup signifikan (Azenzoul et al., 2025; Souguir et al., 2025; Ruzgas et al., 2023).

Selain faktor regulasi dan kapasitas administrasi, tingkat digitalisasi ekonomi, struktur industri, serta partisipasi pelaku usaha informal dalam platform digital business turut memengaruhi kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak. Negara dengan infrastruktur digital yang matang dan sistem perpajakan berbasis teknologi cenderung lebih mampu mengoptimalkan potensi pajak dari aktivitas *digital business* (Khando & Islam, 2023; Saptono et al., 2023;). Sebaliknya, negara dengan tingkat kepatuhan rendah dan sistem pengawasanj terbatas menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengintegrasikan ekonomi digital ke dalam basis pajak nasional. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa dampak *digital business* terhadap penerimaan pajak bersifat multidimensional dan kontekstual (Abuakel & Ibrahim, 2023; Bassey et al., 2022; Gnangnon, 2023).

Mengingat dinamika perkembangan *digital business* dan inkonsistensi temuan empiris yang ada, diperlukan sintesis literatur yang komprehensif dan terstruktur untuk memahami hubungan antara perkembangan *digital business* dan *tax revenue generation* secara lebih mendalam. Pendekatan *systematic*

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

literature review menjadi relevan untuk mengidentifikasi tren penelitian, kerangka teoritis yang digunakan, variabel utama yang dianalisis, serta kesenjangan riset yang masih terbuka. Melalui proses seleksi, evaluasi, dan analisis yang sistematis, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih terintegrasi mengenai bagaimana perkembangan *digital business* mempengaruhi penerimaan pajak negara serta implikasinya bagi perumusan kebijakan fiskal di era ekonomi digital.

Studi Literatur

Digital Economy Theory

Digital economy theory menjelaskan transformasi aktivitas ekonomi dari sistem konvensional menuju ekosistem berbasis teknologi informasi yang ditandai oleh konektivitas global, pemrosesan data secara *real-time*, dan model bisnis berbasis platform (Căpus et al., 2025; Mi et al., 2025) . Perkembangan *digital business* merupakan manifestasi konkret dari ekonomi digital yang mengintegrasikan produsen, konsumen, dan perantara dalam satu jaringan elektronik tanpa batas geografis yang jelas. Dalam kerangka ini, nilai ekonomi tidak lagi semata-mata dihasilkan dari aset fisik, tetapi juga dari data, algoritma, dan jaringan pengguna. Karakteristik tersebut menciptakan efisiensi transaksi, penurunan biaya distribusi, serta perluasan akses pasar yang signifikan bagi pelaku usaha berbagai skala (Wulfert et al., 2024; Du et al., 2022).

Namun demikian, transformasi digital juga mengubah struktur dasar sistem perpajakan yang secara historis bergantung pada keberadaan fisik dan batas yurisdiksi teritorial (Greggi & Miotto, 2024; Tyutyuryukov & Tyutyuryukov, 2021). Transaksi *digital business* memungkinkan pelaku usaha beroperasi di suatu negara tanpa kehadiran fisik yang permanen, sehingga menimbulkan tantangan dalam menentukan nexus pajak dan hak pemajakan. *Digital economy theory* menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi ini menuntut adaptasi kebijakan fiskal agar mampu menangkap nilai tambah yang tercipta dalam ruang digital. Dengan demikian, perkembangan *digital business* tidak hanya dipahami sebagai fenomena teknologi, tetapi juga sebagai perubahan struktural yang berdampak langsung pada desain sistem perpajakan dan kapasitas penerimaan negara (Belahouaoui, 2025; Zheng, 2024).

Tax Revenue

Tax revenue merepresentasikan sumber utama pembiayaan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat dan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama & Muhammad, 2025; Wulfert et al., 2024). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk luasnya basis pajak, tingkat tarif yang diterapkan, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sistem administrasi dan pengawasan fiskal (Putri et al., 2024; Pradilatri et al., 2022; Rachidi & Moudden, 2025). Dalam konteks perkembangan *digital business* , pertumbuhan transaksi digital berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan volume perdagangan, peningkatan konsumsi, serta integrasi pelaku usaha informal ke dalam sistem ekonomi formal. Digitalisasi aktivitas ekonomi secara teoritis memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan transparan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas perpajakan (Kotsogiannis et al., 2025; Skandalis, 2025).

Namun demikian, karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas, berbasis platform global, dan tidak selalu memerlukan kehadiran fisik menimbulkan tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak (Dang et al., 2024; Kempkes & St, 2022). Ketidaksesuaian antara lokasi konsumsi, lokasi perusahaan terdaftar, dan lokasi infrastruktur digital seperti server dapat menciptakan celah dalam pemajakan. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara serta keterbatasan akses data lintas yurisdiksi berpotensi menyebabkan erosi basis pajak apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif. Oleh karena itu, kontribusi *digital business* terhadap *tax revenue* sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyesuaikan regulasi, memperkuat administrasi perpajakan, serta membangun kerja sama internasional untuk memastikan keadilan dan efektivitas pemungutan pajak di era digital (Fortea, 2025; Johannesen, 2022).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

Digital Business

Perkembangan *digital business* mencerminkan integrasi teknologi digital dalam sistem perdagangan yang ditandai dengan munculnya *marketplace, platform peer-to-peer*, dan model bisnis berbasis aplikasi (Yu & Sekiguchi, 2024; Su et al., 2022). Ekspansi ini didorong oleh peningkatan penetrasi internet, inovasi sistem pembayaran elektronik, serta perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan transaksi. *Digital business* tidak hanya memfasilitasi perdagangan domestik, tetapi juga mempercepat arus perdagangan lintas negara melalui sistem logistik dan pembayaran global. Perubahan tersebut meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas peluang usaha bagi pelaku bisnis kecil maupun besar (Borojo, 2025; Cassia & Magno, 2022).

Dalam perspektif fiskal, perkembangan *digital business* menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, platform digital memungkinkan pemerintah mengidentifikasi transaksi secara lebih sistematis melalui integrasi data elektronik (Louvieris & Ioannou, 2024; Vatamanu & Tofan, 2025). Di sisi lain, kompleksitas model bisnis digital, seperti *dropshipping*, *cloud services*, dan *digital goods*, menyulitkan proses klasifikasi dan penentuan objek pajak. Tingkat digitalisasi suatu negara, struktur industri, serta kesiapan infrastruktur perpajakan menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana *digital business* dapat berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, *digital busniess* perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari implikasinya terhadap sistem fiskal nasional (Najjar et al., 2024; Poliak, 2026).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis secara sistematis berbagai penelitian yang relevan mengenai perkembangan *digital business* dan dampaknya terhadap *tax revenue generation.* Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan evaluasi literatur dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data *Scopus, Web of Science (WoS), ScienceDirect*, dan MDPI, yang dikenal sebagai jurnal bereputasi dan memiliki kredibilitas akademik dalam bidang ekonomi digital, perpajakan, dan kebijakan publik.

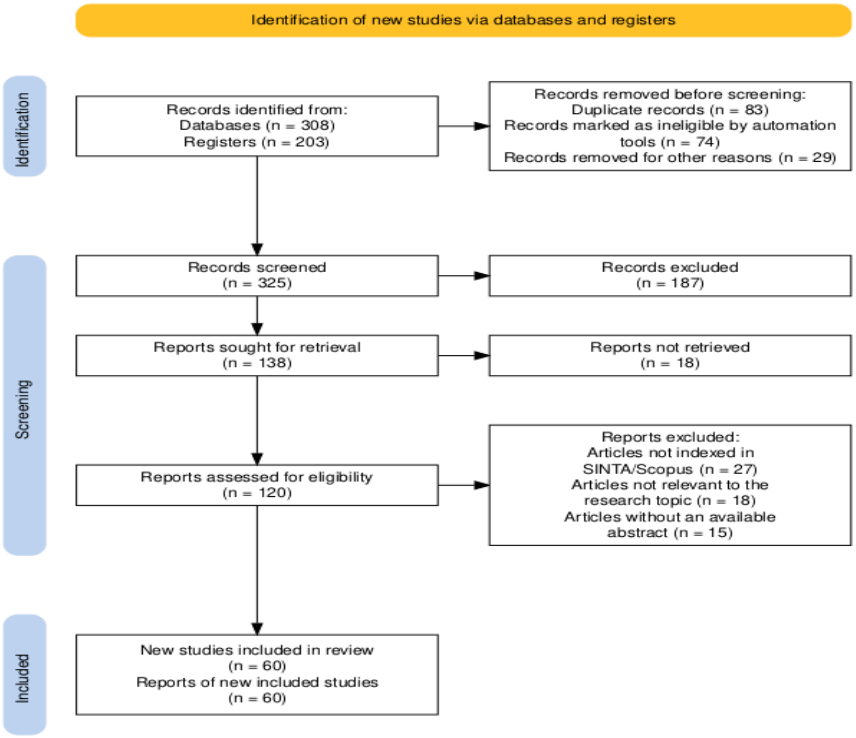
Sejalan dengan sumber data tersebut, sebagian besar artikel yang dianalisis merupakan publikasi yang terindeks Scopus, mulai dari kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh jurnal internasional bereputasi lainnya yang relevan dengan topik *digital business* dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai perkembangan ekonomi digital dan implikasinya terhadap sistem perpajakan telah menjadi perhatian yang signifikan dalam literatur akademik global. Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pencarian literatur menggunakan kata kunci tertentu, yaitu:
   a. Perkembangan *digital business* dan transformasi ekonomi digital.
   b. Dampak *digital business* terhadap tax revenue generation.
   c. Tantangan dan kebijakan perpajakan dalam konteks transaksi digital dan lintas batas.
2. Peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, serta kesesuaian substansi penelitian dengan fokus kajian mengenai hubungan antara *digital business* dan penerimaan pajak.
3. Pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keseluruhan isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi *(inclusion criteria*) yang telah ditetapkan, termasuk relevansi variabel, kejelasan metodologi, serta kontribusi terhadap pemahaman mengenai implikasi fiskal dari ekonomi digital.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, penelitian ini menganalisis artikel jurnal yang dipublikasikan pada periode 2016–2026 dengan fokus pada perkembangan *digital business* , kebijakan pajak digital, serta dampaknya terhadap *tax revenue generation* di berbagai negara. Mengacu pada kerangka PRISMA, dari 528 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, proses penyaringan dan evaluasi kelayakan menghasilkan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

60 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis secara mendalam. Diagram alur seleksi literatur disajikan pada bagian hasil penelitian.



Gambar 1. PRISMA *Flow Diagram*

Gambar 1 tersebut menunjukkan diagram alur seleksi artikel penelitian menggunakan metode *PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)* yang menggambarkan proses identifikasi, penyaringan, hingga penentuan akhir artikel yang digunakan dalam suatu kajian *systematic literature review*. Pada tahap **i***dentification* (identifikasi), peneliti menemukan sejumlah artikel dari berbagai sumber. Tercatat terdapat 308 artikel yang berasal dari database dan 203 artikel dari register lainnya, sehingga total awal artikel yang teridentifikasi cukup besar. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan awal sebelum seleksi, di mana ditemukan 83 artikel duplikat, 74 artikel yang ditandai tidak layak oleh alat otomatis, serta 29 artikel yang dihapus karena alasan lain. Setelah tahap tersebut, masuk pada tahap screening (penyaringan). Pada tahap ini terdapat 325 artikel yang disaring berdasarkan judul dan abstrak. Dari jumlah tersebut, 187 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian 138 artikel dipilih untuk tahap pengambilan laporan penuh (*full text retrieval*). Namun, dalam proses ini terdapat 18 artikel yang tidak berhasil diperoleh dokumen lengkapnya, sehingga tersisa 120 artikel yang dapat dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah *eligibility* (kelayakan), yaitu penilaian terhadap kelayakan artikel secara lebih mendalam. Pada tahap ini beberapa artikel kembali dikeluarkan dengan alasan tertentu, yaitu 27 artikel tidak terindeks di SINTA atau Scopus, 18 artikel tidak relevan dengan topik penelitian, dan 15 artikel tidak memiliki abstrak yang tersedia. Pada tahap akhir yaitu *included* (inklusi), setelah melalui seluruh proses seleksi, diperoleh 60 artikel yang memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam kajian literatur. Jumlah laporan yang digunakan dalam studi ini juga sebanyak 60 artikel. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan proses seleksi literatur yang sistematis, transparan, dan terstruktur, sehingga artikel yang digunakan dalam penelitian benar-benar memenuhi kriteria kualitas dan relevansi yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Artikel-artikel terpilih tersebut berasal dari berbagai kawasan geografis, mencerminkan variasi konteks regulasi dan tingkat perkembangan ekonomi digital, serta diklasifikasikan berdasarkan indeks

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

jurnal tempat publikasinya sebagai indikator kualitas dan kredibilitas sumber literatur. Distribusi artikel berdasarkan kategori indeks jurnal memberikan gambaran mengenai mutu referensi yang mendasari penelitian ini dan selanjutnya disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Scopus Q1	24	40,0%
Scopus Q2	18	30,0%
Scopus Q3	10	16,7%
Scopus Q4	8	13,3%
Total	**60**	**100%**

Tabel 1 menunjukkan bahwa artikel yang dianalisis tersebar secara relatif seimbang pada berbagai kuartil jurnal terindeks Scopus. Scopus Q1 mencakup 24 artikel (40,0%), yang menunjukkan bahwa kajian mengenai perkembangan *digital business* dan implikasinya terhadap tax revenue generation telah banyak dipublikasikan dalam jurnal bereputasi tinggi. Publikasi pada kuartil pertama umumnya menampilkan pendekatan metodologis yang kuat serta kontribusi konseptual yang signifikan dalam bidang ekonomi digital dan kebijakan fiskal.

Sementara itu, artikel yang terindeks pada Scopus Q2 dan Q3 masing-masing berkontribusi 30,0% dan 16,7%, yang menunjukkan bahwa diskursus mengenai *digital business* dan penerimaan pajak juga berkembang secara luas dalam berbagai forum akademik dengan tingkat selektivitas yang beragam. Keberadaan artikel pada Scopus Q4 (13,3%) turut memperkaya perspektif analisis, terutama dalam konteks studi kasus negara tertentu atau pendekatan kebijakan yang lebih spesifik. Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa topik *digital business* dan *tax revenue generation* telah menjadi perhatian lintas spektrum jurnal akademik, baik pada tingkat global maupun regional.

Tabel 2. Distribusi Negara Artikel Penelitian

Teori	Jumlah Artikel	Persentase	Negara Dominan (Positif)	Negara Relatif Rendah / Tantangan (Negatif)
Technology Acceptance Model (TAM)	15	25,0%	Amerika Serikat (36,7%), China (15,0%), United Kingdom (13,3%)	Indonesia (6,7%), Brazil (5,0%)
Digital Economy Theory	14	23,3%	Amerika Serikat (21,4%), Germany (10,0%), China (21,4%), United Kingdom (21,4%)	Indonesia (7,1%), Brazil (7,1%)
Institutional Theory	11	18,3%	United Kingdom (18,2%), Germany (18,2%), Canada (5,0%), Australia (8,3%)	Indonesia (9,1%), India (10,0%)
Stakeholder Theory	8	13,3%	United Kingdom (25,0%), Australia (25,0%), Netherlands (3,3%)	China (12,5%), India (12,5%)

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Teori	Jumlah Artikel	Persentase	Negara Dominan (Positif)	Negara Relatif Rendah / Tantangan (Negatif)
Signalling Theory	6	10,0%	Amerika Serikat (33,3%), United Kingdom (33,3%), Canada (16,7%)	Brazil (16,7%), Indonesia (16,7%)
Deterrence Theory	4	6,7%	India (25,0%), Indonesia (25,0%), Brazil (25,0%)	United Kingdom (12,5%), Netherlands (12,5%)
Legitimacy Theory	2	3,3%	France (3,3%), Netherlands (3,3%), Australia (50,0%)	China (50,0%), India (50,0%)

Berdasarkan Tabel 2, distribusi negara asal publikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan China menjadi dua kontributor utama dalam kajian mengenai perkembangan *digital business* dan dampaknya terhadap *tax revenue generation*. Hal ini mencerminkan besarnya pasar digital di kedua negara tersebut serta kompleksitas kebijakan pajak yang dihadapi dalam mengelola transaksi elektronik berskala besar. Kontribusi signifikan dari United Kingdom dan India juga menunjukkan bahwa baik negara maju maupun negara berkembang memberikan perhatian yang besar terhadap implikasi fiskal dari ekonomi digital.

Partisipasi negara-negara seperti Germany, Australia, South Korea, dan Indonesia memperlihatkan bahwa isu *digital business* dan penerimaan pajak menjadi perhatian dalam berbagai konteks tingkat digitalisasi dan kapasitas kelembagaan yang berbeda. Sementara itu, kontribusi dari Canada, Brazil, France, dan Netherlands menunjukkan bahwa kajian ini bersifat global dan lintas kawasan. Secara keseluruhan, distribusi negara tersebut menegaskan bahwa hubungan antara perkembangan *digital business* dan *tax revenue generation* telah dikaji secara luas dalam berbagai sistem ekonomi dan kerangka kebijakan fiskal yang beragam.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teoritis dalam Studi *Digital business dan Tax Revenue*

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 60 artikel ilmiah yang dianalisis menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR), penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan *digital business* dan implikasinya terhadap *tax revenue generation*. Variasi teori yang digunakan menunjukkan bahwa hubungan antara transformasi ekonomi digital dan penerimaan pajak tidak dapat dipahami hanya dari sisi fiskal, melainkan juga dari sisi adopsi teknologi, legitimasi sosial, serta dinamika kelembagaan. Perkembangan *digital business* menciptakan perubahan perilaku pelaku usaha dan konsumen yang pada akhirnya mempengaruhi struktur transaksi, pola pelaporan, serta potensi penerimaan pajak negara.

Secara umum, teori-teori yang digunakan dalam literatur dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan adopsi teknologi, ekonomi digital, kelembagaan, dan teori hubungan pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana *digital business* diadopsi oleh masyarakat, bagaimana struktur pasar digital terbentuk, serta bagaimana negara merespons melalui regulasi dan kebijakan perpajakan. Distribusi penggunaan kerangka teoritis dalam penelitian-penelitian tersebut disajikan pada tabel berikut.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

Tabel 3. Distribusi Teori Penelitian

Teori	Jumlah Artikel	Persentase
Technology Acceptance Model	15	25,0%
Digital Economy Theory	14	23,3%
Institutional Theory	11	18,3%
Stakeholder Theory	8	13,3%
Signalling Theory	6	10,0%
Deterrence Theory	4	6,7%
Legitimacy Theory	2	3,3%
Total	**60**	**100%**

Berdasarkan Tabel 3, *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi teori paling dominan, menunjukkan bahwa adopsi teknologi sangat menentukan perkembangan digital business dan potensi basis pajaknya. Digital Economy Theory menjelaskan perubahan struktur ekonomi akibat model bisnis digital lintas batas, sementara *Institutional Theory* menekankan pentingnya kualitas regulasi dan kapasitas administrasi pajak. Teori lainnya seperti *Stakeholder, Signaling, Deterrence*, dan Legitimacy melengkapi analisis dengan menyoroti peran transparansi, pengawasan, dan dukungan sosial dalam kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, hubungan digital business dan tax revenue bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan teknologi serta kelembagaan secara terpadu.

Perkembangan *Digital business* dan Dinamika Ekonomi Digital

Perkembangan *digital business* merupakan konsekuensi dari transformasi struktural dalam sistem ekonomi global yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Wang et al., 2025; Biancolin & Rotaris, 2024; Paun et al., 2024). Integrasi internet, perangkat seluler, sistem pembayaran digital, serta platform berbasis aplikasi telah mengubah cara pelaku usaha dan konsumen berinteraksi dalam proses transaksi. Adapun perkembangan *digital business* dapat dilihat dari berbagai indikator transformasi ekonomi digital sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan *Digital Business* dan Dinamikan Ekonomi Digital

Aspek	Fokus Utama	Tahun Perkembangan	Persentase (%)
Transformasi Teknologi	Integrasi internet & platform digital	2000–2010	18
Model Bisnis Platform	Marketplace, fintech, ekonomi berbagi	2010–2015	20
Digitalisasi Pembayaran	E-wallet & sistem pembayaran elektronik	2012–2018	12
Ekspansi Lintas Batas	Transaksi global tanpa batas geografis	2015–2020	14
Inklusi Ekonomi Digital	Akses UMKM ke ekosistem digital	2018–2023	13
Perubahan Perilaku Konsumen	Transaksi instan & e-commerce	2020–2024	12

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

Aspek	Fokus Utama	Tahun Perkembangan	Persentase (%)
Disparitas Antarnegara	Ketimpangan infrastruktur digital	2021–2026	11
Total			**100**

Tabel 4 menunjukkan bahwa perkembangan digital business berlangsung secara bertahap dari 2000 hingga 2026, dimulai dari transformasi teknologi, berkembang ke model bisnis platform dan digitalisasi pembayaran, hingga isu ekspansi global, inklusi ekonomi, dan disparitas antarnegara. Dalam literatur ekonomi digital, *digital business* dipahami sebagai mekanisme perdagangan elektronik yang memungkinkan distribusi barang dan jasa dilakukan tanpa keterbatasan ruang dan waktu (Yang et al., 2023; Liang et al., 2021). Perubahan ini tidak hanya memodifikasi saluran distribusi tradisional, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang berbasis platform, jaringan, dan data sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi (Căpus et al., 2025; Mi et al., 2025; Wulfert et al., 2024; Du et al., 2022).

Dinamika ekonomi digital memperlihatkan bahwa *digital business* berkembang seiring meningkatnya penetrasi internet global dan adopsi teknologi digital oleh rumah tangga maupun pelaku usaha (Wang et al., 2025; Biancolin & Rotaris, 2024; Paun et al., 2024). Platform marketplace, penyedia layanan digital, serta sistem pembayaran elektronik telah memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga mendorong inklusi ekonomi dalam skala yang lebih luas. Selain itu, kemudahan transaksi dan efisiensi biaya distribusi mendorong peningkatan volume perdagangan, baik dalam konteks domestik maupun lintas negara. Dengan demikian, digital business tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi berbasis digital (Yang et al., 2023; Liang et al., 2021).

Namun demikian, karakteristik *digital business* yang bersifat lintas batas dan tidak selalu memerlukan kehadiran fisik di lokasi konsumen menciptakan kompleksitas dalam tata kelola ekonomi digital (Cahyadini et al., 2024; Sun et al., 2024; Greggi & Miotto, 2024; Mpofu & Mhlanga, 2022). Model bisnis berbasis cloud computing, digital services, dan penjualan produk virtual memperluas definisi aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh transaksi fisik. Kondisi ini mengaburkan batas antara lokasi produksi, lokasi konsumsi, dan lokasi pelaporan pendapatan, sehingga menantang kerangka regulasi tradisional yang berbasis territorial nexus (Cahyadini et al., 2024; Sun et al., 2024). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *digital business* tidak hanya berdampak pada pola perdagangan, tetapi juga mempengaruhi struktur institusional dan kebijakan publik (Belahouaoui, 2025; Zheng, 2024).

Literatur juga menunjukkan adanya disparitas perkembangan *digital business* antarnegara (Umbet et al., 2025; Khando & Islam, 2023). Negara dengan infrastruktur digital yang matang, regulasi yang adaptif, dan sistem logistik yang efisien cenderung mengalami pertumbuhan *digital business* yang lebih stabil dan terintegrasi dengan sistem ekonomi formal (Umbet et al., 2025; Khando & Islam, 2023). Sebaliknya, di negara berkembang, pertumbuhan yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kapasitas administrasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan integrasi aktivitas digital ke dalam sistem fiskal nasional. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa dinamika *digital business* sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, tingkat digitalisasi, serta kapasitas kelembagaan masing-masing negara (Khando & Islam, 2023; Umbet et al., 2025; Abuakel & Ibrahim, 2023; Gnangnon, 2023).

Selain itu, perkembangan *digital business* juga memicu perubahan perilaku konsumen dan struktur persaingan pasar (Biancolin & Rotaris, 2024; Paun et al., 2024). Konsumen semakin mengandalkan platform digital untuk memperoleh informasi, membandingkan harga, dan melakukan transaksi secara instan (Paun et al., 2024). Sementara itu, pelaku usaha menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan sistem digital guna mempertahankan daya saing (Yang et al., 2023; Liang et al., 2021). Transformasi ini

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

mempercepat integrasi ekonomi digital dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan ritel, jasa keuangan, pendidikan, dan layanan hiburan (Căpus et al., 2025; Mi et al., 2025). Dengan demikian, *digital business* menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi digital yang terus berkembang dan membentuk ulang lanskap perdagangan global (Liu et al., 2026; Yang et al., 2023; Liang et al., 2021).

Secara keseluruhan, perkembangan *digital business* mencerminkan pergeseran paradigma ekonomi menuju sistem yang lebih terhubung, berbasis data, dan terdigitalisasi (Căpus et al., 2025; Mi et al., 2025; Wulfert et al., 2024; Du et al., 2022). Transformasi ini membawa peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun sekaligus menciptakan tantangan regulasi dan fiskal yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif (Cahyadini et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika *digital business* menjadi penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital dapat berjalan selaras dengan penguatan kapasitas fiskal negara (Anomah et al., 2024; Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022).

Dampak *Digital Business* Terhadap *Tax Revenue Generation*

Dampak perkembangan *digital business* terhadap *tax revenue generation* merupakan isu sentral dalam literatur perpajakan dan ekonomi digital (Bellon et al., 2022; Mpofu, 2022; Tofan & Bostan, 2022). Secara teoritis, pertumbuhan digital business berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan volume transaksi, peningkatan konsumsi, serta integrasi pelaku usaha informal ke dalam sistem ekonomi formal. Digitalisasi transaksi memungkinkan pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pengawasan fiskal. Dalam konteks ini, *digital business* dapat menjadi instrumen yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak apabila didukung oleh kebijakan dan administrasi perpajakan yang efektif (Anomah et al., 2024; Mu et al., 2022;).

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa dampak *digital business* terhadap penerimaan pajak tidak bersifat linear maupun otomatis (Azenzoul et al., 2025; Souguir et al., 2025; Ruzgas et al., 2023;). Karakteristik transaksi digital yang lintas yurisdiksi dan tidak bergantung pada kehadiran fisik seringkali menyulitkan penentuan hak pemajakan antarnegara. Ketidaksesuaian antara lokasi konsumsi dan lokasi perusahaan terdaftar dapat menyebabkan sebagian aktivitas ekonomi digital tidak sepenuhnya tercakup dalam sistem pajak nasional (Dang et al., 2024; Kempkes, 2022). Selain itu, penggunaan platform global dan sistem pembayaran internasional berpotensi mengurangi visibilitas otoritas pajak terhadap arus transaksi digital, terutama di negara dengan kapasitas administrasi yang terbatas (Anomah et al., 2024; Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022).

Perkembangan *digital business* juga memunculkan tantangan terkait erosi basis pajak dan penghindaran pajak dalam ekonomi digital (Cahyadini et al., 2025; Parastatidou, 2025; Mpofu & Moloi, 2022). Model bisnis berbasis *intangible assets* dan data memungkinkan perusahaan digital mengalokasikan pendapatan di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi ini dapat mengurangi potensi penerimaan pajak di negara tempat konsumsi terjadi apabila tidak diimbangi dengan reformasi regulasi yang memadai (Fortea, 2025; Johannesen, 2022). Oleh karena itu, kontribusi *digital business* terhadap *tax revenue generation* sangat bergantung pada desain kebijakan pajak digital, tingkat koordinasi internasional, serta kemampuan administrasi pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengawasan.

Literatur empiris menunjukkan variasi temuan mengenai hubungan antara digital business dan tax revenue (Anomah et al., 2024; Vărzaru et al., 2023; Mu et al., 2022). Beberapa studi menemukan korelasi positif antara peningkatan transaksi digital dan pertumbuhan penerimaan pajak, terutama di negara yang telah menerapkan pajak pertambahan nilai atas transaksi elektronik secara efektif. Selain itu, beberapa kajian juga mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan pajak digital yang berkaitan dengan kesiapan regulasi serta tingkat kepatuhan pelaku usaha berbasis digital (Azenzoul et al., 2025; Souguir et al., 2025; Ruzgas et al., 2023). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak *digital business* terhadap penerimaan pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor institusional serta kebijakan domestik.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Maret 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n1.8113

Selain aspek regulasi, tingkat literasi pajak pelaku usaha dan konsumen juga berperan dalam menentukan efektivitas pemungutan pajak dari aktivitas *digital business* (Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022). Digitalisasi ekonomi membuka peluang untuk integrasi sistem perpajakan berbasis data, seperti pemungutan pajak otomatis melalui platform atau integrasi sistem pembayaran dengan otoritas pajak (Louvieris & Ioannou, 2024; Vatamanu & Tofan, 2025). Namun, tanpa dukungan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Anomah et al., 2024; Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas administrasi dan inovasi kebijakan menjadi elemen penting dalam memaksimalkan kontribusi digital business terhadap penerimaan negara (Anomah et al., 2024; Bassey et al., 2022; Bhalla & Sharma, 2022).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa dampak *digital business* terhadap *tax revenue generation* bersifat kompleks dan multidimensional (Abuakel & Ibrahim, 2023; Gnangnon, 2023). Hubungan tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara pertumbuhan ekonomi digital, kualitas regulasi, kapasitas administrasi perpajakan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Ketidakkonsistenan hasil empiris dalam berbagai konteks negara menegaskan perlunya pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi pola hubungan, faktor penentu, serta kondisi batas yang mempengaruhi kontribusi digital business terhadap penerimaan pajak di era ekonomi digital (Azenzoul et al., 2025; Souguir et al., 2025; Ruzgas et al., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil SLR terhadap 60 artikel ilmiah yang dianalisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan *digital business* memiliki implikasi yang signifikan terhadap *tax revenue generation*, baik dalam bentuk perluasan basis pajak maupun dalam bentuk tantangan terhadap efektivitas pemungutan pajak. Literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital berpotensi meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan konsumsi, formalitas usaha, serta pencatatan transaksi yang lebih transparan. Namun demikian, kontribusi tersebut tidak bersifat otomatis dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi perpajakan, kualitas regulasi, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam ekosistem digital.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa hubungan antara *digital business* dan *tax revenue generation* bersifat kontekstual dan multidimensional. Di satu sisi, digitalisasi ekonomi memperluas aktivitas ekonomi yang dapat dikenai pajak dan mendorong integrasi sistem perpajakan berbasis teknologi. Di sisi lain, karakter lintas yurisdiksi, model bisnis berbasis *intangible assets*, serta ketidaksesuaian antara lokasi konsumsi dan lokasi pelaporan pendapatan menciptakan potensi erosi basis pajak apabila tidak diimbangi dengan reformasi kebijakan yang memadai. Dengan demikian, dampak *digital business* terhadap penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan pajak digital dan koordinasi internasional.

Dari perspektif teoretis, literatur menunjukkan bahwa analisis hubungan *digital business* dan *tax revenue* banyak didasarkan pada pendekatan ekonomi digital, keuangan publik, dan institusional. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penerimaan pajak dalam era digital merupakan hasil interaksi antara ekspansi aktivitas ekonomi, desain kebijakan fiskal, serta kapasitas kelembagaan negara. Oleh karena itu, perkembangan *digital business* perlu dipahami sebagai fenomena struktural yang mempengaruhi kapasitas fiskal negara secara dinamis dan berkelanjutan.

Referensi

Abuakel, S. A., & Ibrahim, M. (2023). The Effect of Relative Advantage , Top Management Support and IT Infrastructure on E-Filing Adoption. *Journal of Risk and Financial Management*, *16*(295), 1–20. https://doi.org/10.3390/ jrfm16060295

Anomah, S., Ayeboafo, B., Aduamoah, M., & Agyabeng, O. (2024). Blockchain technology integration in tax policy : Navigating challenges and unlocking opportunities for improving the taxation of Ghana ' s digital economy. *Scientific African*, *24*(16), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02210

Aulia, S., & Hambali, A. (2022). Digital Service Tax : Lessons Learned. *Proceedings*, *83*(7), 1–8. https://doi.org/10.3390/ proceedings2022083007

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Azenzoul, A., Mahouat, N., Mokhlis, K., & Moussaid, A. (2025). Digital Transformation and Corporate Tax Avoidance : Evidence from Moroccan Listed Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(10), 1–22. https://doi.org/10.3390/ jrfm18100575

Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, *39*(4), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754

Belahouaoui, R. (2025). Tax Fraud Detection Using Artificial Intelligence-Based Technologies : Trends and Implications. *Journal of Risk Management*, *18*(9), 1–25. https://doi.org/10.3390/jrfm18090502

Bellon, M., Dabla-norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance : Evidence from VAT e-Invoicing in Peru q. *Journal of Public Economics*, *210*(10), 1–28. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco. 2022.104661

Bhalla, N., & Sharma, R. K. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance : A PLS-SEM Analysis. *Sustainability*, *14*(10), 1–18. https://doi.org/10.3390/ su141610217

Biancolin, M., & Rotaris, L. (2024). Environmental impact of business-to-consumer digital business : Does it matter to consumers ? *Research in Transportation Business & Management*, *52*(10), 1-10. https://doi.org/10. 1016/j.rtbm.2023.101087

Borojo, D. G. (2025). From Click to Cargo : The Role of Digitalization , Cross-Border Digital business , and Logistics in Deepening the China – Africa Trade. *Economies*, *13*(6), 1–33. https://doi.org/10.3390/economies13060171

Cahyadini, A., Amalia, P., & Fahriza, F. (2025). Tax Strategy as an Alternative to Tax Incentives to Stimulate Investment in the Global Minimum Tax Era in Indonesia. *Laws*, *14*(66), 1–15. https://doi.org/10.3390/laws14050066

Cahyadini, A., Putri, S. A., Safiranita, T., & Hidayat, M. J. (2024). Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation. *Laws*, *13*(7), 1–15. https://doi.org/10.3390/ laws13010007

Căpus, S., Barbu, C.-M., Solomon, A.-G., & Rakos, I.-S. (2025). Reshaping the Digital Economy with Big Data: A Meta-Analysis of Trends and Technological Evolution. *Electronics*, *14*(27), 1–34. https://doi.org/10.3390/ electronics14132709

Cassia, F., & Magno, F. (2022). Cross-border digital business as a foreign market entry mode among SMEs : the relationship between export capabilities and performance. *Review of International Business and Strategy*, *32*(2), 267–283. https://doi.org/10.1108/RIBS-02-2021-0027

Dang, N. T., Andreadakis, S., Nika, P., & Nandy, M. (2024). Breaking the Boundaries in the Digital Age : Open Banking and Tax Evasion. *International Journal of Financial Studies*, *12*(86), 1–27. https://doi.org/10.3390/ ijfs12030086

Du, H., Teng, Y., Ma, Z., & Guo, X. (2022). Value Creation in Platform Enterprises : A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis. *Sustainability*, *14*(5), 1–21. https://doi.org/10.3390/su14095331

Fortea, C. (2025). Government Revenue Structure and Fiscal Performance in the G7 : Evidence from a Panel Data Analysis. *World*, *6*(97), 1–26. https://doi.org/10.3390/ world6030097

Gnangnon, S. K. (2023). Effect of the Shadow Economy on Tax Reform in Developing Countries. *Economies*, *11*(96), 1–49. https://doi.org/10.3390/ economies11030096

Greggi, M., & Miotto, A. (2024). The OECD Dispute Resolution System in Tax Controversies. *Laws*, *13*(45), 1–15. https://doi.org/10.3390/laws13040045

Johannesen, N. (2022). The global minimum tax. *Journal of Public Economics*, *212*(9), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104709

Kempkes, G., & St, N. (2022). Re-allocating taxing rights and minimum tax rates in international profit taxation. *Journal of Government and Economics*, *7*(10), 1–22. https://doi.org/10.1016/j.jge.2022.100048

Khando, K., & Islam, M. S. (2023). The Emerging Technologies of Digital Payments and Associated

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Challenges : A Systematic Literature Review. *Future Internet*, *15*(21), 1–21. https://doi.org/10.3390/fi1501002

Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, Tax Audits and VAT Compliance. *Journal of Development Economics*, *172*(10), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403

Liang, Y., Guo, L., Li, J., Zhang, S., & Fei, X. (2021). The Impact of Trade Facilitation on Cross-Border Digital business Transactions : Analysis Based on the Marine and Land Cross-Border Logistical Practices between China and. *Water*, *13*(24), 1–16. https://doi.org/10.3390/w13243567

Liu, A., Osewe, M., Shi, Y., Zhen, X., & Wu, Y. (2026). Cross-Border Digital business Development and Challenges in China : A Systematic Literature Review. *Journal of Theoritical and Applied Electronic Commerce Research*, *17*(1), 69–88. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jtaer17010004

Liu, Y., & Lian, X. (2025). The spatial spillover effect of digital economy on regional tax Revenue : An empirical study based on the decay boundary and spillover path. *International Review of Economics and Finance*, *102*(6), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104352

Louvieris, P., & Ioannou, G. (2024). Making Tax Smart : Feasibility of Distributed Ledger Technology for Building Tax Compliance Functionality to Central Bank Digital Currency. *Applied System Information*, *7*(106), 1–37.

Mi, K., Cui, Z., Zhu, X., & Zhuang, R. (2025). Can Green Credit Improve the Innovation of Enterprise Green Technology : Evidence from 271 Cities in China. *Systems*, *12*(63), 1–19. https://doi.org/10.3390/ systems12020063

Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes : Opportunities , Challenges , and Implications for African Countries. *Economies*, *10*(21), 1–28. https://doi.org/10.3390/economies10090219

Mpofu, F. Y. (2022). Taxing the Digital Economy through Consumption Taxes (VAT) in African Countries : Possibilities , Constraints and Implications. *International Journal of Finance*, *10*(65), 1–21. https://doi.org/10.3390/ ijfs10030065

Mpofu, F. Y., & Mhlanga, D. (2022). Digital Financial Inclusion , Digital Financial Services Tax and Financial Inclusion in the Fourth Industrial Revolution Era in Africa. *Economies*, *10*(18), 1–22. https://doi.org/10.3390/ economies10080 184

Mpofu, F. Y., & Moloi, T. (2022). Direct Digital Services Taxes in Africa and the Canons of Taxation. *Laws*, *11*(57), 1–20. https://doi.org/10.3390/laws11040 057

Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance : The Mediating Role of Electronics Tax System , Evidence from the Amhara Region, Ethiopia. *Sustainability*, *14*(61), 1–22. https://doi.org/10.3390/ su14106105

Najjar, M. Al, Mahboub, R., & Nakhal, B. (2024). Exploring the Role of AI in Improving VAT Reporting Quality : Experimental Study in Emerging Markets. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(477), 1–13.

Omodero, C. O. (2025). The Road to Tax Collection Digitalization : An Assessment of the Effectiveness of Digital Payment Systems in Nigeria and the Role of Macroeconomic Factors. *International Journal of Financial Studies*, *13*(3), 1–25. https://doi.org/10.3390/ijfs13030178

Parastatidou, G. (2025). Identifying Base Erosion Through the Expenses Localness Indicators Model : A Methodology for Supporting Social Investment. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(6), 1–17. https://doi.org/10.3390/ jrfm18060326

Paun, C., Ivascu, C., Olteteanu, A., & Dantis, D. (2024). The Main Drivers of Digital business Adoption : A Global Panel Data Analysis. *Journal of Theoritical and Applied Electronic Commerce Research*, *19*(3), 2198–2217. https://doi.org/10.3390/jtaer19030107

Poliak, M. (2026). The Impact of Digitization Transport Documents on the Competitiveness of Road Freight Transport Companies. *Logistics*, *10*(20), 1–22.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pradilatri, K., Djaelani, Y., Yana, D., & Sari, A. (2022). The Influence of the Implementation of E-Filling and E-Billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization and Understanding of the Internet as Moderating Variables. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, *1*(1), 27–36.

Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing Tax Compliance : Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia , Malaysia , Singapore , and Thailand for the 2022 – 2023 Period). *Economies*, *13*(7), 1–30. https://doi.org/10.3390/economies13070194

Putri, V., Hadli, M., Mohamad, S., Zakaria, N. B., & Zifi, M. P. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah : Empirical Insights on Derivatives , Debt Shifting , Transfer Pricing , and Financial Distress. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(5), 1–17. https://doi.org/10.3390/jrfm17110519

Rachidi, M., & Moudden, A. El. (2025). Corporate Income Tax Differential and Subsidiaries ' Profitability in Morocco : Profit-Shifting Evidence from a Pseudo-Ordinary Least Squares Framework. *International Journal of Financial Studies*, *13*(4), 1–31. https://doi.org/10.3390/ijfs13040236

Ruzgas, T., Kižauskien, L., Lukauskas, M., & Sinkevi˘, E. (2023). Tax Fraud Reduction Using Analytics in an East European Country. *Axioms*, *12*(288), 1–29. https://doi.org/10.3390/axioms12030288

Saptono, P. B., Hodži, S., Khozen, I., Mahmud, G., & Pratiwi, I. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention : The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, *10*(22), 1–24. https://doi.org/10.3390/informatics 10010022

Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodži, S., & Pratiwi, I. (2024). Flourishing MSMEs : The Role of Innovation , Creative Compliance , and Tax Incentives. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(12), 1–49. https://doi.org/10.3390/jrfm17120532

Setyowati, M. S., Utami, N. D., & Saragih, A. H. (2020). Blockchain Technology Application for Value-Added Tax Systems. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(156), 127. https://doi.org/10.3390/ joitmc6040156

Skandalis, K. S. (2025). Unlocking Entrepreneurship in the FinTech Era : The Role of Tax Compliance in Business Performance. *FinTech*, *4*(12), 1–24. https://doi.org/10.3390/fintech4020012

Souguir, Z., Lassoued, N., Khanchel, I., & Bejaoui, E. (2025). Behind the Screens : Digital Transformation and Tax Policy. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(7), 1–21. https://doi.org/10.3390/ jrfm18070390

Su, B. C., Lin, H., & Wang, Y. M. (2022). The Business Model of Digital Platforms for the Sharing Economy : Intensive Case Study Methodology for Rover.com Pet Boarding Platform. *Sustainability*, *14*(16), 1–33. https://doi.org/10.3390/ su142316256

Sun, Y., Liu, W., Li, M., & Data, B. (2024). A Game Model Analysis of the International Digital Service Tax in an Asymmetric Market Duopoly. *International Journal of Fuzzy System Applications*, *13*(1), 1–17. https://doi.org/10.4018/IJFSA.342116

Tofan, M., & Bostan, I. (2022). Some Implications of the Development of Digital business on EU Tax Regulations. *Laws*, *11*(13), 1–26. https://doi.org/10. 3390/laws11010013

Tyutyuryukov, V., & Tyutyuryukov, V. (2021). From remote work to digital nomads : tax issues and tax opportunities of From nomads : tax issues and tax opportunities of From remote remote work work to to digital digital digital nomads : tax issues and tax opportunities of lifestyle From. *IFAC Papers Online*, *54*(13), 188–193. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.10.443

Umbet, M., Askarov, D., & Alikulova, L. (2025). Evaluating the Implementation of Information Technology Audit Systems Within Tax Administration : A Risk Governance Perspective for Enhancing Digital Fiscal Integrity. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(8), 1–22. https://doi.org/10.3390/ jrfm18080422

Vărzaru, A. A., Bocean, C. G., Simion, D., Berceanu, D., & Mangra, M. G. (2023). Digital Revolution, Sustainability, and Government Revenues: A Transversal Analysis of HowDigital Transformation and Sustainable Practices Impact Sustainable Government Revenues. *Systems*, *11*(546), 1–19.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

https://doi.org/10 .3390/systems11110546

Vatamanu, A. F., & Tofan, M. (2025). Integrating Artificial Intelligence into Public Administration : Challenges and Vulnerabilities. *Administrative Sciences*, *15*(4), 1-15.

Wang, Y., Shi, J., Terence T, O., Yun, J., & Yang, Y. (2025). The Impact of Technological Innovations on Consumer Behavior in Digital business : *Journal of Organizational and End User Computing*, *37*(1), 1–27. https://doi.org/10.40 18/JOEUC.372896

Wulfert, T., Woroch, R., & Strobel, G. (2024). Information & Management Follow the flow : An exploratory multi-case study of value creation in digital business ecosystems. *Information & Management*, *61*(8), 1-15. https://doi.org/10. 1016/j.im.2024.104035

Yang, Y., Chen, N., & Chen, H. (2023). The Digital Platform , Enterprise Digital Transformation , and Enterprise Performance of Cross-Border Digital business — From the Perspective of Digital Transformation and Data Elements. *Journal of Theoritical and Applied Electronic Commerce Research*, *18*(2), 777–794. https://doi.org/10.3390/jtaer18020040

Yu, S., & Sekiguchi, T. (2024). Platform-Dependent Entrepreneurship : A Systematic Review. *Administrative Sciences*, *14*(32), 1–18.

Zheng, R. (2024). An Empirical Study on the Digital Economy, Fiscal Policy , and Regional Sustainable Development — Based on Data from Less Developed Regions in China. *Sustainability*, *16*(10), 1–17. https://doi.org/10.3390/s u162210057

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License